

Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia

Achievement of the President's Governance Period BJ. Habibie and Megawati in Indonesia

Junior Hendri Wijaya^{✉1}, Iman Amanda Permatasari²

¹Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

²Biro Sumber Daya Aset, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>

ARTICLE INFO

Capaian,
Pemerintahan,
BJ. Habibie,
Megawati
Achievement,
Governance,

Article History:

Received : November 2018

Accepted : December 2018

Abstrak:

BJ. Habibie dan Megawati merupakan presiden di Indonesia dengan masa kepemimpinan tercepat. Hal itu dikarenakan dalam situasi menuntut untuk menggantikan presiden terdahulu yang lengser. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah capaian masa pemerintahan presiden BJ. Habibie dan Megawati. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menunjukkan Masa pemerintahan BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden Indonesia mesti dalam kurun waktu yang singkat. BJ Habibie berhasil menceta beberapa capaian semasa pemerintahannya yaitu membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi dibidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden yaitu dibidang politik Megawati menciptakan kabinet gotong royong, membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis pada tahun 2004, dibidang ekonomi memperbaiki kinerja ekspor; Megawati berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, telah berhasil menangkap 17 jendral yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri.

Abstract:

BJ. Habibie and Megawati are the presidents in Indonesia with the fastest leadership period. That is because in the situation demands to replace the former president who stepped down. The research method used is a historical descriptive research method. The purpose of the study was to determine the history of achievement of the administration of BJ president. Habibie and Megawati. The findings in this study are to show the BJ administration period. Habibie and Megawati have produced achievements during their presidency in Indonesia in a short period of time. BJ Habibie succeeded in finding several achievements during his administration, namely forming a new cabinet for development reform, improving the economy, freedom of opinion, carrying out political reforms, carrying out the MPR special session in 1998, general elections in 1999. Likewise, Megawati's administration created achievements during his tenure as president, namely in the political field, Megawati created a cabinet of mutual cooperation, made a policy in establishing the institution of the Corruption Eradication Commission, held democratic elections in 2004, assisted the economy to improve export performance, Megawati succeeded in leaving the IMF in 2003, successfully arrested 17 corrupt general. Megawati also succeeded in stopping the Caltex oil mining contract in the Riau Islands Natuna Block.

Cite this as:

Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia. *Cakrawala*, 12(2). 196-207. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>

[✉]Corresponding author :

Address : Jl. Brawijaya, Tamantirto Kasihan Bantul DIY
Email : juniorhendri8@gmail.com
Phone : 082326796566

© 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur
p-ISSN 1978-0354 | e-ISSN 2622-013X

Pendahuluan

Presiden merupakan suatu jabatan resmi dalam sebuah Negara, salah satunya adalah Negara Indonesia. Presiden di Negara Indonesia disebut sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB III tentang kekuasaan Pemerintah Negara pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

Indonesia menerapkan sistem presidensial berkombinasi multipartai. Berdasarkan studi *Scot Mainwaring*, jarang sekali presiden terpilih dari partai mayoritas. Dengan terpilihnya *minority president*, untuk mencapai mayoritas di parlemen maka presiden berupaya untuk memperkuat posisinya dengan melakukan koalisi namun membangun koalisi yang stabil lebih jauh lebih sulit dalam demokrasi multipartai presidensial (Efriza, 2016).

Terlahirnya orang-orang yang pernah menjabat sebagai kepala Negara di Indonesia di antaranya Soekarno, Soeharto, Gusdur, bahkan BJ. Habibi dan Megawati telah banyak menyimpan berbagai karakter kepemimpinan berbeda-beda hingga masing-masing banyak mencapai puncak keberhasilan semasa jabatannya.

Secara yuridis, dalam pengambilan sumpah jabatan wakil presiden untuk menjabat presiden harus dilakukan dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, secara *de facto* BJ. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia tetapi secara *de Jure* belum. Meskipun menurut aturan hukum yang berlaku khususnya pasal 6 ayat 1, pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR II/MPR/1973 BJ Habibie tidak menyalahi, tetapi hal ini sangat jarang terjadi, atau dengan kata lain hal ini tidak etis atau tidak sah (Krisharyanto, 2000).

Selama menjabat sebagai kepala negara, kepemimpinan BJ Habibie bersifat Dedikatif-Fasiliatif. Di masa pemerintahannya, kebebasan pers di buka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratis yang lebih besar. Dan pada saat itu pula peraturan-peraturan perundang-undangan banyak dibuat (Syakdiah, 2015).

Gaya komunikasi pun penuh spontanitas, meletup-letup, cepat bereaksi, tanpa mau memikirkan resikonya. Dalam situasi penuh emosional, Habibie cenderung bertindak atau mengambil keputusan secara cepat, seolah kehilangan kesabaran untuk menurunkan tensinya. Karakteristik ini diilustrasikan dengan kisah lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang terbuka. Namun, terkesan mau menang sendiri dalam berwacana dan alergi terhadap kritik (Sovya, 2013).

Berbeda dengan Megawati. Keterlibatan perempuan dalam perpolitikan secara umum jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki yang sangat dominan di kursi parlemen. Masih menganut sistem patrilineal, mengakibatkan adanya *gap* atau jurang pemisah antara perempuan dengan dunia politik (Hasibuan, 2014).

Partai politik berlambang benteng gemuk bermulut putih telah memenangkan pemilu 1999 dengan meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Akan tetapi, ternyata pada Sidang Umum MPR 1999 Mega kalah. Namun, posisi kedua tersebut rupanya merupakan tahapan bagi Megawati untuk memantapkan diri pada posisi nomor satu di negeri ini. Kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 juli 2001, anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 menggantikan KH Abdurahman Wahid dan menjabat sampai tanggal 20 Oktober 2003 (Syakdiah, 2015).

BJ. Habibie dan Megawati merupakan presiden dengan masa kepemimpinan tercepat. BJ. Habibie wakil presiden pertama yang menggantikan presiden Soeharto ketika harus turun dari jabatan setelah terjadi konflik. Begitupun dengan Megawati yang menggantikan Presiden Gusdur ketika diturunkan dari jabatan. Artikel ini memfokuskan diri pada pandangan peneliti terkait capaian presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia selama masa pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Peneliti memulai menjelaskan tentang capaian selama masa pemerintahan presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia dengan melakukan pemetaan studi-studi yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Syakdiah pada tahun 2015 yang berjudul “Presiden Republik Indonesia dan Gaya Kepemimpinannya”, menghasilkan simpulan hasil: Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarah sebagai suatu bangsa dengan menyusun pemerintahan, dengan landasan konstitusi dan ideologi yang diciptakan sendiri sesuai perkembangan budaya masyarakat. Pada awal kemerdekaan ini, para *founding fathers* melihat bahwa Republik Indonesia memiliki beraneka ragam pulau, bahasa, daerah, agama, kepercayaan, adat istiadat, suku bangsa, dan kebiasaan lainnya. Maka, dibuatlah konstitusi yang cenderung agak intergralistik, yaitu kekuasaan berada di tangan eksekutif (Syakdiah, 2015).

Saat itu para *founding father* bekerja penuh pengabdian dan patriotis, jauh dari materialisme. Indonesia disegani di dunia internasional karena kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan kuat itu ditunjukkan antara lain oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia. Di setiap komunitas selalu ada pemimpinnya. Peran

pemimpin beraneka ragam, di antaranya adalah sebagai penggerak, motivator. Sebagai penggerak dan motivator, maka pemimpin harus menjadikan semua orang yang dipimpinnya hidup. Jiwa, pikiran, dan semangat dari semua orang yang dipimpin menjadi hidup dan berkembang. Untuk menggerakkan bagi semua yang dipimpinnya, seorang pemimpin membutuhkan tipe atau gaya yang dimiliki pemimpin untuk memimpin semua orang. Pemimpin juga berperan sebagai inspirator, penunjuk arah, menyatukan, pelindung, pengayom, penolong, pembagi kasih sayang, mencukupi serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Semua peran itu akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia yang dipimpinnya maupun di hadapan Tuhan kelak.

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Manna BR Sembiring, Marwoto Saiman, Tugiman yang berjudul “Kebijakan Politik Presiden B. J. Habibie Tahun 1998-1999” menghasilkan kesimpulan B. J. Habibie memerintah mulai tanggal 21 Mei 1998 sampai 21 Oktober 1999. Kebijakan politik yang dibuatnya yaitu pembebasan tahanan politik dan narapidana politik, kebebasan pers, kebebasan membentuk partai politik, pelaksanaan pemilu tahun 1999, referendum Timor-Timur dan mengusut kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Dalam menjalankan kebijakan politik tersebut, dampaknya berbagai pelanggaran HAM muncul, seperti terjadinya tragedi semanggi I dan II yang banyak memakan korban jiwa, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia padahal sudah banyak pengorbanan dan bantuan Indonesia terhadap Timor-Timur dan juga status hukum mantan Presiden Soeharto belum terselesaikan (Manna Br.S, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Safitri pada tahun 2014 dengan judul “*Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik*”, menghasilkan simpulan latar belakang

sosial, persepsi, cara melakukan evaluasi, saluran komunikasi yang digunakan adalah empat faktor yang dapat menjelaskan bagaimana Megawati dapat menjadi seorang pemimpin simbolik. Megawati, sebagai ketua umum PDIP, pada pemilu 2014, bersaing kuat dengan partai lainnya, khususnya Gerindra. Walau tampil menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak, PDIP tidak cukup signifikan untuk mengajukan capres sendiri. Namun, posisi Megawati sebagai pemimpin partai, sangat menentukan dalam proses pemilihan capres dari PDIP. Dan Megawati menentukan untuk memberikan mandat kepada Joko Widodo yang dilakukan sebelum pemilu legislatif. Selain itu, dalam pemilu kali ini, Megawati banyak membentuk pendapat nasional, terutama perihal pemberian mandat yang berujung konflik dengan Prabowo, Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra. Pemberian mandat ini menjadikan Megawati sebagai pemimpin simbolik yang “sesungguhnya”. Megawati memberikan simbol kepada Joko Widodo untuk meneruskan “perjuangannya” (Safitri, 2014).

Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berikhtir serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling sedikit kata “perintah”. Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dibagai atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit

hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas, selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). Kekuasaan lain seperti fereartif, konsultatif, inspektif, maupun konstitutif tidak merata pada setiap negara (Syafie, 2011).

Presiden

Besarnya kekuasaan presiden di Indonesia adalah karena keberadaan UUD 1945, yang sebelum diamandemen dengan memberikan kedudukan demikian. Misalnya, kekuasaan presiden sebagai kepala negara bersifat seremonial dan protokoler kenegaraan, yaitu: Melaksanakan perjanjian dengan negara lain. Mengadakan perdamaian dengan negara lain. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Mengumumkan perang kepada negara lain. Mengangkat atau memberhentikan duta atau konsul untuk negara lain (Syafie, 2011).

Secara lengkap, yang menjadi presiden dan wakil presiden secara resmi di negara Indonesia dapat dilihat dalam tabel.1 di bawah ini:

Tabel.1 Presiden Republik Indonesia

Nama	Tahun Jabatana
Ir. Soekarno	1945-1967
Jend.(Purn) TNI Soeharto	1967-1998
Prof. Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie	1998-1999
KH. Abdurrahman Wahid	1999-2001
DR. Megawati Soekarno Putri	2001-2004
Jend. (Purn) Sosilo Bambang Yudhoyono	2004-2014
Ir. H Joko Widodo	2014-Sekarang

Sumber: <http://www.beritauberita.com>

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Deskriptif historis merupakan penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu (Norjanah, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui capaian masa jabatan era presiden B.J Habibie dan Megawati di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung berhubungan dengan penelitian, namun menunjang penelitian untuk dilaksanakan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber-sumber tersebut seperti jurnal, buku, internet. Dengan melihat tema dan pokok permasalahan yang telah disusun, maka penulis menyusun unit analisa yang sesuai dengan pokok permasalahan tersebut. Melalui unit analisa data tersebut maka didapatkan sumber data yang tepat, sehingga penelitian disusun secara baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah capaian masa pemerintahan presiden B.J Habibie dan Megawati di Indonesia.

Setelah sumber data didapatkan, maka tahap selanjutnya yang harus sangat diperhatikan adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri adalah proses atau bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data-data yang relevan bagi penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisa isi atau *content* adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang berupa dokumentasi. Baik itu dokumentasi secara tulisan (Buku, jurnal, berita, internet, lisan, maupun

berupa gambar, dengan pertimbangan bahwa data-data tersebut relevan dengan permasalahan penelitian yang peneliti ambil. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah teknik sekunder, karena data yang dibutuhkan didapatkan dari sumber-sumber sekunder. Seperti buku, jurnal ilmiah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan capaian masa pemerintahan presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Sistem Pemerintahan

Untuk menggerakkan para pengikut, pastilah pemimpin harus memiliki peran. Pemimpin harus mempunyai wewenang untuk mengarahkan kegiatan para anggota atau kelompok. Perilaku ini sering disebut dengan kepemimpinan atau *style of leadership*. Setiap pemimpin mempunyai kepemimpinan yang berbeda antara satu dengan yang lain (Mira & Margaretha, 2012). Begitu juga dengan presiden, untuk dapat menggerakkan para rakyatnya. Sehingga, tanggung jawab di dalam pemerintahan sangat besar.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara-negara yang menjalankan kekuasaan mutlak, bagaimanapun tetap memberlakukan hukum sebagai peraturan yang harus diikuti. Hanya saja, hukum yang dijalankan tersebut bersifat absolut, karena itu diperlukan pertimbangan kekuasaan dalam konstitusi, termasuk jabatan seorang presiden (Syafie, 2011).

Masa Jabatan BJ. Habibie

Tepat pada pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR No.VII 1973, di hadapan Mahkamah Agung dilaksanakan penyerahan jabatan presiden berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Selain penyerahan kekuasaan, pada saat itu juga sekaligus mengangkat BJ. Habibie menjadikan presiden menggantikan Soeharto.



Gambar 1
BJ Habibie saat diambil sumpahnya
sebagai Presiden RI

Sumber: <https://smpn1kotaserang.sch.id/244-2/>

Pasal 4 TAP MPR No.III/MPR/1978 memang mengatakan bahwa MPR “dapat” memberhentikan presiden dengan berbagai alasan, antara lain “atas permintaan sendiri”. Pada waktu itu ada tuntutan luas dari masyarakat agar Soeharto “mundur sekarang juga”. Andai waktu itu Soeharto minta berhenti kepada MPR, maka desakan agar “ia mundur sekarang juga” itu sulit dipenuhi. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan Sidang Istimewa MPR. Prosedurnya juga berbelit-belit. MPR sendiri pada waktu itu dituding sebagai “sarang nepotisme”. Kalau demikian siapa yang menjamin MPR mengabulkan permintaan Soeharto berhenti. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali Soeharto membuat “pernyataan berhenti” secara sepihak. Dengan begitu, tidak diperlukan kata “setuju” atau “tidak setuju” dari MPR. Soeharto dengan serta merta berhenti dari jabatannya. Konsekuensi dari tindakan ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 2 TAP MPR No.VII/MPR/ 1973, wakil presiden otomatis menggantikannya menjadi presiden (Mahendra, 1998).

Naiknya BJ. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, telah mengundang berbagai perdebatan hukum dan kontroversial. Hal itu dikarenakan Soeharto menyerahkan secara sepihak

kekuasaan kepada Habibie. Di kalangan mahasiswa terdapat beberapa sikap atau kelompok atas pelantikan Habibie sebagai presiden. Pertama, menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru. Kedua, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan sementara jabatan presiden tidak boleh kosong. Ketiga, mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie adalah sah dan konstitusional (Firmandus, 2015).

Terdapat 66 buah undang-undang yang telah dihasilkan oleh BJ. Habibie selama masa jabatannya. Jelas ini tidak lepas dari *euphoria* penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perundang-undangan di era Habibie adalah yang menegaskan arah perekonomian negara Indonesia. Hal ini diundangkan dalam perubahan terhadap UU no.7 tahun 1992 menjadi UU no. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Jiwa liberalisasi di sektor keuangan dan perbankan dinilai lebih liberal dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Singapura. Hal ini secara ekspilisit dapat dibaca dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yang memberi kebebasan bagi WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau Badan Hukum Indonesia (Syam, 2010).

Masa Jabatan Megawati

Masa Republik keenam adalah periode diberlakukannya UUD 1945, setelah mengalami proses perubahan ketatanegaraan fundamental yang tetap dinamakan UUD 1945. Secara tepatnya, periode ini dihitung mulai 10 Agustus 2002 sampai terjadinya perubahan yang fundamental terhadap konstitusi. Dengan adanya perubahan I-IV, selama masa republik V terjadilah perubahan yang sangat fundamental dari segi ketatanegaraan. Dan dapat dikatakan juga, lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan

mendapatkan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang baru menurut “konstitusi yang baru” (Na’imah, 2015).

Megawati merupakan putri dari presiden pertama di Indonesia, yaitu Soekarno. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa Megawati dapat mewarisi mendiang ayahnya sebagai pemimpin bangsa. Kepemimpinan Megawati juga dilatarbelakangi oleh keadaan dan situasi politik yang tidak stabil. Di saat itu, Abdurrahman Wahid sudah tidak mendapat dukungan di parlemen terkait kasus *Buloggate dan Bruneigate* yang berakibat dikeluarkannya Memorandum I, II dan sidang istimewa, sehingga Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden keempat dan digantikan oleh Megawati (Wahyuni, 2008).



Gambar 2
Pelantikan Megawati sebagai Presiden

Sumber: <https://www.timesbanyuwangi.com/read/19576/2/20170723/091148/peristiwa-penting-pada-23-juli-gus-dur-lengser-megawati-menjadi-presiden/>

Masa jabatan Megawati sempat menuai persoalan keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dengan temuan persoalan mendasar, yakni permasalahan keterwakilan perempuan yang sangat minim di bangku kursi parlemen atau di ruang publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari minimnya jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR RI, tetapi terkait partisipasi perempuan dalam politik

dan masyarakat (Safitri, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disusul dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang tersebut telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon legislatif. Akan tetapi, UU belum terealisasi seperti dalam tabel. 2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Presentase Anggota Legislatif Perempuan di DPR RI Tahun 2009-2014.

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Perempuan	99 orang	17,68
Laki-Laki	461 orang	82,32

Sumber: situs resmi <http://www.dpr.go.id>

Terlihat dalam Tabel 2, tersebut bahwa jumlah dan presentase anggota legislatif perempuan di DPR RI menunjukkan dominasi laki-laki yang duduk di kursi parlemen.

Akan tetapi, pada masa jabatannya, Megawati menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang berkarismatik. Tidak hanya karena faktor keturunan semata, tetapi juga karena kepribadiannya yang teguh dalam berprinsip. Meskipun tidak pernah belajar ilmu kepemimpinan secara formal, Megawati banyak belajar dari lingkungan yang membesarkannya. Sebagai pemimpin, Megawati memiliki visi dan misi yang memperjuangkan 4 pilar berbangsa dan bernegara, di antaranya: Pancasila 1 juni 1945, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Serta 3 pilar Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara

budaya (Mustafa, 2011).

Capaian Masa Kepemimpinan B.J Habibie

Di masa kepemimpinan BJ Habibie, terdapat 6 macam tuntutan, yaitu: penegakan hukum supremasi, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mengadili mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, Amendemen Konstitusi, Pencabutan Dwi Fungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah dengan seluas-luasnya. Tentu di masa kepemimpinannya Habibie membawa reputasi yang tidak mudah dipercaya oleh kalangan mahasiswa, militer, fraksi-fraksi besar, pemerintah asing, investor luar negeri, dan bahkan berbadan hukum internasional (Amin, 2014).

Kebijakan yang diambil oleh Habibie adalah membebaskan para tahanan politik pada masa orde baru, peningkatan kebebasan pers, Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah, pembentukan parpol, dan percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian Timor-Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, dan pemberian gelar pahlawan reformasi bagi bagi korban Trisakti (Firnandus, 2015).

Adapun capaian-capaian yang berhasil diraih oleh BJ Habibie selama masa jabatan, salah satunya adalah diadakan pembentukan kabinet. BJ Habibie Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer (TNI-Polri), PPP, Golkar, dan PDI. Kemudian, BJ. Habibie mampu memberikan kebijakan dalam bidang politik, yaitu dengan melakukan Reformasi. Reformasi dalam bidang politik ini berhasil mengganti lima paket UU masa Orde Baru dengan tiga UU politik yang lebih demokratis. Adapun tiga UU tersebut adalah: (a) UU No. 2 Tahun

1999 Tentang Partai Politik, (b) UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, (c) UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR (sejarah-negara.com, 2014).

BJ. Habibie memberikan kebijakan dalam bidang ekonomi untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk. Dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia di antaranya: merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF (sejarah-negara.com, 2014).

Selain kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) (Bimantara, 2011).

Reformasi di Bidang Hukum. Pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaharuan bidang hukum, tetapi dalam realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elitnya. Misalnya dalam UU Ketenagakerjaan, tetap saja terdapat dominasi penguasa. DPR selama orde baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak penguasa bukan memihak kepentingan masyarakat. Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan keadaan demokratis dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk pembongkaran dan reformasi hukum

Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu: substansi hukum, aparaturnya yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Hal tersebut karena mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat kreativitas masyarakat, adanya praktek KKN sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat (sejarah-negara.com, 2014).

Pelaksanaan Pemilu tahun 1999. Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 Partai Politik. Asas pemilihan umum tahun 1999 adalah sebagai berikut: Langsung, pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara. Umum, bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih. Bebas, tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun/pihak manapun. Rahasia, tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan cara apa pun. Jujur, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara langsung) harus bersikap dan bertindak jujur, yakni sesuai aturan yang berlaku. Adil, bahwa pemilu dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum (sejarah-negara.com, 2014).

Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999. Setelah Komisi

Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu, Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akibatnya dimunculkanlah tiga calon presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan presiden, di antaranya adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun, pada tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri.

Capaian Masa Pemerintahan Megawati

Terdapat capaian-capaian yang dilahirkan pada masa pemerintahan Megawati, yaitu: Megawati berhasil mendirikan lembaga pemberantas korupsi yang dikenal dengan Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pendirian lembaga KPK ini berdasarkan Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan (KPK, 2017).

Megawati dapat menghentikan aktivitas pertambangan freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL. Tidak hanya sebatas itu, Megawati juga dapat menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepulauan Riau. Kemudian, Megawati mampu membubarkan BUMN terkorup pada masa

itu, yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan triliyun dan banyak praktek illegal di dalamnya. Aset dari pembubaran BUMN ini dipakai untuk membayar hutang negara (Fauzi, 2014).

Pada masa jabatannya, Megawati pun berhasil menangkap 17 jenderal korup (termasuk jenderal ketua PBSI). Tidak hanya itu, Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan bisa lebih mandiri. Hal ini di terbukti, Megawati mereduksi kecenderungannya pada barat dan berusaha bertindak netral. Ia pun menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain: David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latief, Uung Bursa, Prayoga Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Raharja, Sudikatmono, Adul Latief, dan lainnya.

Capaian lainnya adalah ketika Megawati mengeluarkan Keppres No 34 Tahun 2004 Tentang Penerbitan Bisnis TNI. Ia mendirikan Akademi Intelejen yang pertama di Indonesia. Kemudian, melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Dan pada masa pemerintahan Megawati juga dapat mengembalikan proporsi pendapatan gas arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata (Fauzi, 2014).

Simpulan

BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden di Indonesia meski dalam masa jabatan yang tergolong singkat. BJ Habibie berhasil mencetak beberapa capaian semasa pemerintahannya, yaitu membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi di bidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998,

dan pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan Megawati yang telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden. Di bidang politik, Megawati menciptakan kabinet gotong royong, membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mengadakan pemilu yang bersifat demokratis pada tahun 2004. Pada bidang ekonomi, Megawati memperbaiki kinerja ekspor, berhasil membawa Indonesia keluar dari IMF pada tahun 2003, dan menangkap 17 jenderal yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. Penulis mengajukan rekomendasi berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian. Rekomendasi yang penulis ajukan diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya; kepada Pemerintah, sudah sewajarnya dapat mempelajari sejarah-sejarah capaian dari presiden terdahulu, sebagai alat referensi didalam mengambil keputusan. Kepada peneliti selanjutnya, Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia”, ini diharapkan adanya kajian pendalaman lebih dalam berbagai capaian-capaian presiden BJ. Habibie dan Megawati.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berkontribusi dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa juga, terima kasih peneliti ucapkan kepada pihak jurnal Cakrawala yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2014, November 22). 6 *Tuntutan Reformasi*. Retrieved from academia.edu: http://www.academia.edu/9427296/6_TUNTUTAN_REFORMASI
- Bimantara, R. I. (2011, May). *Sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa Habibie*. Retrieved from academia.edu: http://www.academia.edu/16452320/Sejarah_ketatanegaraan_Indonesia_pada_masa_Habibie
- Efriza. (2016). Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945; Studi Kasus Presiden SBY dan Jokowi. *Jurnal Renaissance Vol.1 No.01*, 25.
- Fauzi, C. (2014). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Megawati Mengenai Utang Negara*. Retrieved from academia: http://www.academia.edu/8946942/KEBIJAKAN_POLITIK_LUAR_NEGERI_INDONESIA_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_MEGAWATI_MENGENAI_UTANG_NEGARA di akses pada tanggal 11 November 2018
- Firmandus, A. F. (2015). *Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) Kebijakan Politik Dalam Negeri*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hasibuan, L. (2014, April 1). *Perempuan dan Politik: Studi analisis Wacana Kekuatan Perempuan dalam Politik Film "Teh Iron Lady"*. Retrieved from eprints.uns.ac. id: <http://eprints.uns.ac.id/15072/1/348292701201410436.pdf>
- KPK. (2017, Desember 6). *Sekilas KPK*. Retrieved from kpk: <https://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>
- Krisharyanto, E. (2000). Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia. *Perapektif Vol. V No.1*, 14.
- Manna Br.S, F. (2013, July 27). *B. J. Habibie political policy in 1998 up to 1999*. Retrieved from repository.unri.ac.id: <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4806>
- Mira, W. S., & Margaretha, M. (2012). Pengaruh Servant Leadership Terhadap Komitmen Organisasi dan Organization Citizenship Behavior . *Jurnal Manajemen vol.11 no. 2*, 189-190.
- Mustafa, H. (2011). *Kepemimpinan Karismatik : Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri Dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Na'imah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *KHAZANAH Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1*, 166.
- Norjanah. (2014). *Jenis-Jenis Penelitian*. Retrieved from academia: http://www.academia.edu/11679493/Jenis-Jenis_Penelitian
- Safitri, D. (2014). Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. *Jurnal Komunikasi vol.9 no.1*, 50.

- Sejarah-negara.com. (2014, April). *Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie*. Retrieved from sejarah-negara: <https://www.sejarah-negara.com/2014/04/masa-pemerintahan-presiden-bj-habibie.html>
- Sovya, H. (2013, Desember 20). *Mengenal Gaya Kepemimpinan Presiden di Indonesia*. Retrieved from kompasiana: <http://sosok.kompasiana.com/2013/04/16/mengenal-gayakepemimpinan-presiden-di-indonesia-551824.html>
- Syafie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syakdiah. (2015). *Presiden Republik Indonesia dan Gaya Kepemimpinannya*. *POPULIKA UWMY Vol. V NO. 1*, 115-116.
- Syam, N. (2010, Juni 30). *Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis*. Retrieved from uinsby: <http://digilib.uinsby.ac.id/14244/>
- Wahyuni, K. (2008). *Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-2004*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.